

ANALISIS KINERJA APARATUR DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA SENDAWAR KABUPATEN SELUMA

Heliza Soviana

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

soviahelina@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the performance of village apparatus in the administration of government in Sendawar Village, Seluma Regency. The data collection technique was through observation, in-depth interviews, and documentation, and involved eight key informants consisting of village heads, village secretaries, village officials, and the community. The results of the study show that in general, the performance of village officials in Sendawar Village still faces various serious obstacles, especially in terms of low productivity and service quality due to the lack of human resource competence, limited understanding of main tasks and functions, and low mastery of information technology such as computers. Although there are village officials who already have higher education, the collective performance is still not optimal, reflected in the slow completion of public administration, low attendance discipline, and lack of clarity in service procedures. From the aspect of responsiveness, the community assesses that village officials tend to be slow to respond to administrative needs such as correspondence and other services. In terms of responsibility, the implementation of duties is not fully in accordance with the principles of good administration, and there are still inconsistencies between policy and implementation. In terms of accountability, community involvement in village deliberations is still minimal and uneven, resulting in a lack of transparency and public participation in village decision-making. These findings show that there is a need for intensive coaching, continuous training of apparatus competencies, and strengthening a digital-based village governance system in order to achieve effective, efficient, and participatory village governance.

Keywords: Village Apparatus Performance, Village Government, Productivity, Service Quality, Responsiveness, Accountability

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita cita kemerdekaan. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia sampai saat ini, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, dan mandiri sehingga bisa menciptakan landasan yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Endah, 2018).

Aparatur desa diselenggarakan oleh aparatur desa, hal tersebut ditegaskan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Aparatur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh aparatur Desa atau yang disebut dengan nama lain, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 25. dan diteruskan pada Pasal 48 “Aparatur desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis”. Kepala desa mempunyai beberapa tugas diantaranya: menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Supriadi, 2019).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa, SOTK Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Perangkat Desa terdiri atas: Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila kinerja aparat desa dalam memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan desa yang prinsipnya akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien serta bebas dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Pemerintah Desa merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di desa mempunyai unsur besar, baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan desa sangat tergantung pada kinerja aparatur desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan (Rahman, 2023).

Aparatur Desa merupakan bagian dari aparatur pemerintah yang merupakan salah satu komponen yang mempunyai peranan pelaksana tugas pemerintah. aparatur desa merupakan pegawai yang diangkat oleh pejabat berwenang untuk menjalankan tugas pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat dan tugas sesuai dengan aturan dalam membantu tugas Kepala Desa. Aparatur desa mempunyai peranan sebagai unsur aparatur pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara (Christhna et al., 2017).

Oleh sebab itu seluruh aparatur desa juga diwajibkan mempunyai sebuah rasa tanggung jawab, keterampilan, keahlian, dan perhatian serta juga memerlukan sebuah rasa peduli yang tinggi oleh seorang aparatur desa guna melaksanakan tugasnya yaitu melayani masyarakat (Defripal, 2023) Aparatur Desa dibawah pimpinan Kepala Desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efisien dan akuntabel dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati. Artinya aparatur Desa menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, dan pembinaan lembaga masyarakat. Namun demikian yang terjadi di tingkat pemerintahan desa justru banyak terjadi kejadian-kejadian yang menyangkut rendahnya pelayanan pemerintahan kepada masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas (Satria et al., 2021).

Kritikan tersebut menunjukkan pentingnya sikap aparatur desa dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi aparatur desa tidak terlepas dari sikap dalam jiwa manusia yang sangat kuat mempengaruhi segala keputusan yang diambilnya. Ini berarti bahwa aparatur Pemerintahan Desa sebagai Supporting System utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan padanya (Tadanugi, 2020).

Kinerja aparatur desa sangat penting untuk sebuah organisasi karena dapat mendukung terwujudnya pemerintah yang inklusif, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. kinerja aparatur desa dapat diukur dari beberapa aspek, seperti: Kualitas pengelolaan administrasi desa, Penggunaan waktu kerja dalam pengelolaan administrasi desa, Kerjasama dalam pengelolaan administrasi desa. Kompetensi aparatur desa juga merupakan faktor penting yang dapat menciptakan kebijakan yang efektif dan efisien (Uamang, 2024).

Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, Aparat desa merupakan bagian dari aparat pemerintah yang merupakan salah satu komponen yang mempunyai peranan pelaksana tugas pemerintah. Aparat desa merupakan pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugas pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan terhadap Masyarakat. Aparat desa mempunyai peranan sebagai unsur aparatur pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia (Ulina, 2015).

Tugas pokok dan fungsi aparatur desa menurut (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa, Kepala Desa: Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sekretaris Desa: Membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan, Tugasnya: Tata naskah dinas, Administrasi surat menyurat, Arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa, Pengadministrasian aset desa, Pengadministrasian inventarisasi desa, Pengadministrasian perjalanan dinas, Pelayanan umum, Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, Monitoring dan evaluasi program, Penyusunan laporan. Kepala Urusan: Membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas- tugas pemerintahan. Kepala Seksi: Membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Kepala Kewilayahan: Membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya (Maemunah, 2018).

Pemerintah desa beserta aparatnya sebagai administrator penyelenggara utama aktivitas pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan serta sebagai Pembina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya. Peranan mereka demikian penting dan menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintah. Maka diperlukan aparat desa yang menjadi tanggung jawabnya (Panjaitan et al., 2019). Mangkunegara (2015) “pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan jawab yang diberikan kepadanya.

Aparatur desa bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perangkat desa terdiri dari: sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Namun, berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan ditemukan bahwa di kabupaten seluma tepatnya di desa sendawar masih kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi dalam Pembangunan, pelayanan Masyarakat yang belum optimal, kurangnya sumberdaya manusia, kurangnya kemampuan petugas dalam pengoprasian komputer sehingga waktu penyelesaiannya dalam memberikan layanan tidak menentu (Harahap, 2021). Berbeda dengan salah satu desa yang ada di kecamatan talo kecil yaitu desa taba, Dimana di desa tersebut terdapat pelayanan terhadap Masyarakat yang sangat baik, sumber daya manusia yang tinggi dan petugas aparat desa memahami tentang pengoprasian

komputer sehingga waktu penyelesaiannya sesuai yang di inginkan. Dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang desa dan aparatur desa adalah undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dengan berjalannya aparat desa yang baik desa tersebut dapat mengidentifikasi bahwa aparat desa di desa taba sudah berjalan sesuai dengan fungsinya. Hal tersebut berbeda dengan aparat desa di desa sendawar.

Struktur personalia Pemerintahan Desa Sendawar yang terdiri dari sembilan orang aparatur, mulai dari kepala desa hingga kepala dusun. Dari sembilan aparatur tersebut, hanya empat orang yang memiliki gelar sarjana, yaitu Enda Afrizani, Doni Fiksi, Rejon Sugiono, dan Yoyos Maryono. Sementara lima orang lainnya berpendidikan setingkat SLTA atau belum memiliki gelar pendidikan tinggi. Ketimpangan dalam tingkat pendidikan ini menjadi indikasi awal adanya ketidakseimbangan kapasitas aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan yang semakin kompleks, terutama dalam era digitalisasi dan tuntutan pelayanan publik yang cepat dan efisien.

Berdasarkan observasi awal, kinerja aparatur desa di Desa Sendawar menunjukkan beberapa kelemahan yang signifikan. Permasalahan utama terletak pada kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing aparatur, yang berdampak pada rendahnya kualitas layanan kepada masyarakat. Pelayanan administrasi yang seharusnya dapat diselesaikan secara cepat dan tepat sering kali terhambat karena terbatasnya inisiatif dan kemampuan teknis aparatur, khususnya dalam penggunaan teknologi informasi. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya upaya evaluatif dan pelatihan berkelanjutan yang seharusnya mendukung pengembangan kapasitas personal.

Selain itu, tingkat disiplin kerja aparatur juga menjadi permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian serius. Ketidakhadiran pada jam kerja dan kurangnya komitmen dalam menyelesaikan tugas telah melanggar ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Seluma No. 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Hari Kerja dan Atribut Aparatur Desa. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakefisienan dalam pelayanan publik, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur desa. Dampaknya adalah munculnya konflik kecil dan ketegangan antara warga dan aparat desa, yang seharusnya bisa dicegah dengan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Terakhir, aspek administrasi desa yang belum dimanfaatkan secara maksimal juga turut memperlemah performa lembaga pemerintahan desa. Beberapa petugas masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan perangkat komputer untuk pelayanan dasar seperti surat menyurat, pengarsipan, dan pengelolaan data masyarakat. Selain itu, masyarakat juga sering kali mengeluhkan ketidakjelasan prosedur dan biaya layanan, yang memperburuk citra aparatur desa sebagai pelayan publik. Melihat kompleksitas permasalahan ini, maka penelitian tentang analisis kinerja aparatur desa menjadi penting untuk mengidentifikasi akar masalah secara sistematis, serta merumuskan rekomendasi strategis demi memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan desa ke depan.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, terhitung sejak Maret hingga Mei 2025, bertempat di Kantor Desa Sendawar Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada identifikasi awal mengenai sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti rendahnya kedisiplinan kerja aparatur, lemahnya

pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi, serta ketidakefektifan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana kinerja aparatur desa dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik, dan untuk mengungkap berbagai aspek yang menjadi penghambat efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang difokuskan pada penggambaran fenomena sosial apa adanya berdasarkan data empiris yang diperoleh di lapangan (Anggito & Setiawan, 2018).

Dalam menentukan arah dan batasan kajian, peneliti merumuskan fokus penelitian yang mengacu pada teori kinerja dari Agus Dwiyanto (2006), yang terdiri dari lima indikator utama, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Fokus ini kemudian dijabarkan menjadi aspek-aspek teknis yang dapat diukur, seperti ketepatan pelayanan publik, kecepatan respon terhadap kebutuhan masyarakat, sikap aparatur dalam melayani, pelaksanaan tugas berdasarkan aturan administrasi, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan desa. Fokus penelitian ini dirancang untuk membedah persoalan secara menyeluruh, sehingga hasil yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kinerja aparatur desa cenderung belum optimal.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap delapan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu mereka yang dinilai paling mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa (Fiantika et al., 2022). Informan terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, tiga Kepala Dusun, dan tiga orang masyarakat Desa Sendawar. Untuk melengkapi validitas data, digunakan juga data sekunder seperti dokumen peraturan, laporan kegiatan desa, serta literatur akademik yang relevan. Teknik triangulasi digunakan untuk menjamin keabsahan data, yaitu melalui triangulasi sumber, waktu, dan teknik. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten dan dapat dipercaya melalui perbandingan antar-metode dan antar-informan.

Analisis data dilakukan secara simultan sejak awal proses pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian, mengacu pada model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015) yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan merangkum informasi yang dianggap relevan sesuai fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap pola-pola temuan yang muncul. Kesimpulan ditarik dengan memverifikasi data yang telah dianalisis secara terus-menerus guna menjamin konsistensi dan validitas. Keseluruhan proses analisis ini bertujuan untuk menggambarkan realitas objektif terkait kinerja aparatur desa di Desa Sendawar serta memberikan pijakan untuk perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.

HASIL

Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Berdasarkan tujuan penelitian yang disebutkan sebelumnya dalam bab sebelumnya, yaitu untuk mengetahui bagaimana analisis kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sendawar Kabupaten Seluma. Pada bagian ini peneliti akan membahas dan menjelaskan mengenai analisis terhadap tanggapan- tanggapan responden terhadap

indikator- indikator penelitian yang berkaitan dengan analisis kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sendawar.

Dalam menilai bagaimana analisis kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sendawar Kabupaten Seluma penulis menggunakan teori kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006) dengan indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Produktifitas

Menurut Hasibuan dalam Busro (2018) produktivitas didefinisikan sebagai rasio antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*). Peningkatan produktivitas berkontribusi pada peningkatan efisiensi dalam hal waktu, bahan, dan tenaga. Selain itu, peningkatan produktivitas juga memperbaiki sistem kerja, teknik produksi, dan keterampilan tenaga kerja. Sedangkan menurut Handoko dalam Busro (2018) produktivitas adalah sikap mental dan upaya manusia untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya secara seefektif mungkin. Produktivitas ini pada akhirnya diukur melalui masukan yang digunakan untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam konteks produktivitas, penilaian tidak hanya didasarkan pada tingkat efisiensi tetapi juga pada efektivitas pelayanan. Secara umum, produktivitas dipahami sebagai rasio antara input dan output (Ressi Dewana et al., 2023).

Namun, konsep ini dianggap terlalu terbatas, sehingga dikembangkan ukuran produktivitas yang lebih komprehensif dengan memasukkan pencapaian hasil yang diharapkan sebagai penilaian kinerja. Pada konteks penelitian ini, hasil yang ingin dilihat berkaitan dengan sejauh mana pencapaian kinerja aparatur Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja aparatur desa sangat menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam hal administrasi, pelayanan publik, dan pelaksanaan program-program pembangunan. Tujuan dari keberadaan aparatur desa adalah untuk memastikan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana aparatur desa mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal demi tercapainya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan secara optimal. Masih ditemukan berbagai kendala seperti rendahnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi, keterbatasan penguasaan teknologi, kurangnya kedisiplinan kerja, serta lambatnya proses pelayanan administrasi kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas aparatur desa belum mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang diharapkan, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan. Meskipun demikian, terdapat upaya nyata dari pihak aparatur desa untuk memperbaiki kondisi tersebut melalui berbagai strategi peningkatan kinerja. Di antaranya adalah pembagian tugas yang lebih sistematis dan jelas, pelatihan internal terkait pengoperasian teknologi, penerapan evaluasi mingguan terhadap tugas-tugas perangkat desa, serta pengembangan sistem pencatatan dan digitalisasi dokumen secara bertahap.

Upaya-upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah desa untuk mendorong aparatur bekerja lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan berkelanjutan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, diharapkan

kinerja aparatur desa dapat meningkat dan memberikan dampak nyata bagi tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto, khususnya pada indikator Produktivitas, terkait analisis kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sendawar Kecamatan Kabupaten Seluma, belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas-tugas aparatur desa, seperti lambatnya pelayanan administrasi, kurangnya penguasaan teknologi informasi, dan lemahnya kedisiplinan kerja.

Kualiatas Layanan

Menurut Arianto dalam Ginting (2021), kualitas pelayanan diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan pelanggan, serta memastikan ketepatan waktu dalam memenuhi harapan mereka. Sedangkan menurut Kotler dan Keller dalam Ginting (2021), kualitas merupakan gabungan fitur-fitur dari suatu produk atau jasa yang mampu memberikan kepuasan dalam memenuhi kebutuhan. Pada indikator kualitas layanan, dalam melakukan penilaian terhadap kinerja dari suatu organisasi dapat dilihat dari kualitas layanannya. Sehingga dalam melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat sangatlah penting hal ini dikarenakan dapat menjadi salah satu faktor kepercayaan atau kepuasan terhadap kinerja suatu organisasi. Setiap organisasi harus memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai suatu tujuan dari organisasi (Tarigan, 2023).

Pada konteks penelitian ini, ingin melihat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di Desa Sendawar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta seberapa responsif mereka menanggapi keluhan warga. Aparatur desa termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat teknis diharapkan mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan serta layanan desa yang mempertimbangkan hak dan kewajiban masyarakat. Namun, berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh aparatur desa belum berjalan secara menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, dapat disimpulkan bahwa indikator Produktivitas sebagai salah satu aspek dalam teori kinerja menurut Agus Dwiyanto belum berjalan secara optimal.

Hal ini ditunjukkan oleh beberapa temuan di lapangan, seperti belum maksimalnya pelayanan kepada masyarakat, lambatnya proses administrasi karena keterbatasan penguasaan teknologi oleh aparatur desa, serta masih kurangnya kedisiplinan dalam jam kerja. Rendahnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas aparatur desa menyebabkan produktivitas kerja belum sepenuhnya tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat upaya nyata dari aparatur desa untuk memperbaiki kondisi tersebut. Beberapa strategi yang telah diterapkan antara lain pembagian tugas yang lebih terstruktur, pelatihan penggunaan komputer, evaluasi rutin mingguan, serta mulai diterapkannya sistem administrasi berbasis digital sederhana. Meskipun hasil yang dicapai belum sepenuhnya memenuhi standar produktivitas yang ideal, adanya komitmen dan inisiatif dari para aparatur desa merupakan indikasi positif menuju perbaikan kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Dengan dukungan pelatihan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan yang konsisten, diharapkan produktivitas aparatur desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dapat meningkat secara signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto pada indikator Kualitas Layanan terkait analisis kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya kualitas pelayanan publik yang diberikan, keterlambatan dalam proses administrasi, serta belum tanggapnya aparatur dalam merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat inisiatif dari aparatur desa untuk melakukan perbaikan, seperti pelatihan teknis, evaluasi kinerja, dan upaya digitalisasi layanan, yang menunjukkan adanya komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan di masa mendatang.

Responsivitas

Menurut Hormon dalam Sembiring (2017), responsivitas adalah kemampuan pemerintah atau organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan, menyusun agenda dan prioritas, serta mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas mencerminkan sejauh mana program dan kegiatan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Semakin banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diakomodasi dan dijalankan oleh organisasi publik, semakin baik responsivitas organisasi tersebut dinilai. Pada indikator responsivitas, dalam mengukur kinerja dari suatu organisasi dalam melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ditengah banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan menjadikan suatu organisasi harus berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Pemerintahan desa harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat desa (Hardiyansyah, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa responsivitas aparatur Desa Sendawar dalam menampung, merespons, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat telah menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun belum sepenuhnya optimal. Aparatur desa telah berusaha membuka ruang komunikasi baik melalui forum formal seperti musyawarah desa, maupun melalui pendekatan informal seperti interaksi langsung di lingkungan sosial. Selain itu, ada juga inisiatif pemanfaatan teknologi seperti grup WhatsApp RT untuk menjangkau aspirasi dari warga yang tidak dapat hadir langsung ke kantor desa. Aspirasi masyarakat mulai dicatat, dibahas dalam forum perangkat desa, dan ditindaklanjuti dalam bentuk program atau revisi perencanaan kerja desa, termasuk dalam proses penyusunan RAPBDes. Masyarakat pun mengakui bahwa keterlibatan mereka dalam perencanaan pembangunan desa mulai terasa, dan mereka merasa suaranya mulai didengar.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto pada indikator Responsivitas terkait analisis kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma belum berjalan secara optimal.

Responsibilitas

Menurut Agus Dwiyanto (2006) responsibilitas menggambarkan apakah pelaksanaan kegiatan oleh organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Karena itu, responsibilitas dapat berpotensi bertentangan dengan responsivitas, yang menekankan sejauh mana organisasi merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan program dan layanan. Pada indikator responsibilitas, berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk mengatur sejauh mana pemberian layanan telah berlangsung sesuai dengan aturan atau

prosedur yang telah ditetapkan (Rikdan Ardiansyah, 2024). Responsibilitas juga merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana proses pemberian pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan ketentuan organisasi yang telah ditetapkan dengan benar.

Pada konteks penelitian ini, penilaian difokuskan pada upaya aparatur Desa Sendawar dalam menjalankan tugas administrasi pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi publik dan kesesuaian prosedur yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terlepas dari tata kelola administrasi yang tertib, transparan, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur desa diharapkan dapat mengikuti prosedur administrasi dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, hingga pelaporan kegiatan pemerintahan desa. Dalam hal ini, peneliti ingin melihat apakah aparatur Desa Sendawar telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara tertib administratif, baik dalam pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan keuangan, maupun penyusunan dokumen dan laporan desa. Setiap kegiatan pemerintahan seharusnya diawali dengan perencanaan yang matang dan melibatkan semua unsur perangkat desa agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan dapat disimpulkan bahwa tingkat responsibilitas aparatur Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Para aparatur desa tampak telah memahami dan berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prinsip administrasi pemerintahan desa. Hal ini terlihat dari adanya kedisiplinan dalam bekerja, keteraturan dalam pelaksanaan tugas harian, serta ketepatan dalam pelaporan kegiatan, yang telah menjadi bagian dari rutinitas kerja di kantor desa. Selain itu, tanggung jawab aparatur desa juga tercermin dalam upaya mereka untuk mendokumentasikan setiap kegiatan secara tertib dan menyusun laporan pertanggungjawaban yang sesuai prosedur. Fungsi pengawasan internal seperti evaluasi mingguan dan pengecekan administrasi rutin juga telah dilakukan guna memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Aparatur seperti Kaur Keuangan dan Kaur Umum telah berupaya menjaga ketertiban pelaporan keuangan serta kesesuaian program kerja dengan regulasi yang ada, termasuk dalam proses perencanaan dan penggunaan anggaran desa.

Dari sisi masyarakat, seperti yang disampaikan oleh warga, terlihat bahwa dampak dari meningkatnya tanggung jawab aparatur mulai dirasakan secara langsung. Prosedur pelayanan menjadi lebih tertib, petugas lebih informatif, dan waktu pelayanan menjadi lebih efisien. Meskipun belum sempurna dan masih memerlukan peningkatan kapasitas serta konsistensi dalam penerapan prosedur, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa responsibilitas aparatur Desa Sendawar sudah berjalan dengan cukup optimal, dan menunjukkan arah yang baik menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional, tertib, dan akuntabel. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto pada indikator Responsibilitas terkait analisis kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma sudah berjalan secara optimal.

Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo dalam Rahmawati (2017), akuntabilitas adalah tanggung jawab pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, mengungkapkan, dan melaporkan semua aktivitas pemerintahan kepada masyarakat yang memberikan amanah

tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, baik pemerintah pusat, daerah, maupun desa harus memahami ruang lingkup akuntabilitasnya sesuai dengan tugas pokok yang mereka emban. Pada indikator akuntabilitas, berkaitan dengan bentuk tanggung jawab dari pihak yang dipercayakan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang bertujuan untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini karena akuntabilitas yang dimaksud mencakup penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas oleh instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan terhadap aparatur Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa belum sepenuhnya optimal. Para aparatur desa pada dasarnya telah menyadari pentingnya prinsip akuntabilitas, yang mencakup transparansi, keterbukaan informasi, serta pertanggungjawaban terhadap setiap program dan kegiatan desa. Upaya seperti penyusunan laporan pertanggungjawaban tahunan, pengumuman anggaran melalui papan informasi, serta pelaksanaan musyawarah desa telah dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang menghambat penerapan prinsip akuntabilitas secara maksimal.

Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan pemahaman teknis dari aparatur desa terhadap pelaporan digital, keterlambatan dalam penyampaian informasi, serta kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Media komunikasi yang digunakan pun masih terbatas, sehingga tidak semua warga mendapatkan akses informasi secara merata dan tepat waktu. Dari sisi masyarakat, masih terdapat harapan agar pemerintah desa meningkatkan keterbukaan dan memberikan informasi yang lebih jelas serta mudah diakses. Warga juga menginginkan adanya kepastian terhadap layanan administrasi serta partisipasi yang lebih aktif dalam pengawasan penggunaan anggaran desa.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan akuntabilitas yang lebih baik, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, penguatan sistem informasi, serta mekanisme pelibatan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan bertanggung jawab dapat terwujud secara nyata. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto pada indikator Akuntabilitas terkait analisis kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma desa sudah berjalan cukup baik, tetapi belum mencapai tingkat optimal.

PEMBAHASAN

Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sendawar Kabupaten Seluma dengan menggunakan teori kinerja dari Agus Dwiyanto (2006) yang mencakup lima indikator utama, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Analisis dilakukan berdasarkan tanggapan para responden yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas pemerintahan desa. Hasil dari penilaian ini menjadi dasar untuk

mengevaluasi sejauh mana aparatur desa telah menjalankan tugasnya secara efektif dan memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.

Produktifitas

Produktivitas, menurut Hasibuan dan Handoko dalam Busro (2018), merupakan perbandingan antara output dan input, yang tidak hanya mencerminkan efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Dalam konteks pemerintahan desa, produktivitas aparatur dinilai dari seberapa optimal mereka melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, produktivitas menjadi indikator penting dalam menilai kinerja aparatur desa dalam mencapai tujuan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras, produktivitas aparatur desa masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari sejumlah permasalahan seperti kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi, keterbatasan penguasaan teknologi informasi, rendahnya disiplin kerja, serta lambannya pelayanan administrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja aparatur belum efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, yang berdampak pada rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di desa.

Meskipun demikian, telah terlihat beberapa upaya perbaikan dari pihak pemerintah desa seperti pembagian tugas yang lebih terstruktur, pelatihan internal untuk meningkatkan kompetensi teknologi, evaluasi kinerja mingguan, dan digitalisasi dokumen administrasi. Langkah-langkah ini mencerminkan adanya komitmen untuk meningkatkan profesionalisme dan responsivitas aparatur desa. Dengan dukungan dan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, diharapkan produktivitas aparatur dapat meningkat secara bertahap, sehingga tata kelola pemerintahan desa menjadi lebih baik dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.

Kualitas Layanan

Kualitas layanan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja aparatur desa. Menurut Arianto dan Kotler dalam Ginting (2021), kualitas layanan mencerminkan kemampuan suatu organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara tepat waktu dan memuaskan. Dalam konteks pemerintahan desa, kualitas layanan mencakup ketepatan dan kecepatan aparatur dalam memberikan pelayanan administrasi, serta sikap ramah dan responsif terhadap warga. Pelayanan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur.

Hasil penelitian di Desa Sendawar menunjukkan bahwa kualitas layanan aparatur desa masih belum optimal. Beberapa masalah yang ditemukan antara lain lambatnya proses administrasi, kurangnya keterampilan teknologi pada aparatur, serta kedisiplinan waktu kerja yang masih lemah. Pelayanan publik belum mampu memenuhi harapan masyarakat secara menyeluruh, terutama dalam hal kecepatan dan ketepatan layanan surat-menyurat serta kurangnya kepedulian terhadap keluhan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa aparatur desa masih perlu meningkatkan kompetensinya dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.

Namun demikian, terdapat indikasi positif berupa upaya perbaikan yang dilakukan aparatur desa, seperti pelatihan komputer, pembagian tugas yang lebih sistematis, evaluasi mingguan, dan pengembangan sistem administrasi berbasis digital. Langkah-langkah ini menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen aparatur untuk meningkatkan kualitas

layanan. Dengan dukungan pembinaan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas SDM, diharapkan ke depan kualitas pelayanan publik di Desa Sendawar dapat meningkat secara signifikan dan memenuhi standar pelayanan pemerintahan desa yang baik.

Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan aparatur atau organisasi publik dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas, serta merespons dengan program atau kebijakan yang sesuai. Menurut Hormon dalam Sembiring (2017), semakin selaras program kerja pemerintah dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, semakin tinggi tingkat responsivitasnya. Dalam konteks pemerintahan desa, indikator ini menjadi penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar didengar dan diakomodasi dalam proses pembangunan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur Desa Sendawar mulai menunjukkan peningkatan dalam hal responsivitas. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain membuka ruang komunikasi melalui forum musyawarah desa serta pendekatan informal seperti diskusi langsung dan penggunaan grup WhatsApp RT. Aspirasi masyarakat mulai dicatat dan dibahas dalam forum internal desa, serta dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan RAPBDes. Masyarakat pun mulai merasa lebih dilibatkan dalam proses perencanaan dan merasa suaranya memiliki pengaruh terhadap kebijakan desa.

Namun demikian, responsivitas aparatur desa belum sepenuhnya optimal. Beberapa keluhan masyarakat masih belum ditindaklanjuti secara cepat dan tepat, serta belum seluruh warga merasakan akses yang merata terhadap kanal penyampaian aspirasi. Oleh karena itu, meskipun sudah terdapat kemajuan, diperlukan upaya lanjutan dalam memperluas partisipasi masyarakat, memperkuat sistem penyaluran aspirasi, dan meningkatkan kecepatan respon aparatur agar kinerja pada indikator responsivitas dapat semakin meningkat.

Responsibilitas

Responsibilitas mengacu pada sejauh mana aparatur desa menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi publik dan aturan yang berlaku. Menurut Agus Dwiyanto (2006), responsibilitas menekankan kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan, baik secara tertulis maupun tersirat. Dalam konteks pemerintahan desa, hal ini berarti aparatur harus melaksanakan kegiatan pemerintahan dengan tertib, transparan, dan akuntabel, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Hasil penelitian di Desa Sendawar menunjukkan bahwa tingkat responsibilitas aparatur desa tergolong cukup baik. Aparatur desa telah memahami tugas pokok dan fungsi mereka, serta menunjukkan kedisiplinan kerja dan keteraturan dalam pelaksanaan tugas harian. Hal ini terlihat dari ketepatan dalam pelaporan, dokumentasi kegiatan, dan pelaksanaan pengawasan internal seperti evaluasi mingguan. Khususnya, Kaur Keuangan dan Kaur Umum dinilai sudah menjalankan perannya secara tertib dalam menjaga kesesuaian program kerja dan penggunaan anggaran dengan regulasi yang berlaku.

Masyarakat juga mulai merasakan dampak positif dari meningkatnya responsibilitas aparatur desa, seperti pelayanan yang lebih teratur, informatif, dan efisien. Meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya dalam hal konsistensi prosedural dan kapasitas aparatur, secara umum indikator responsibilitas dalam teori kinerja Dwiyanto telah berjalan

cukup optimal di Desa Sendawar. Hal ini menjadi landasan penting bagi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas

Akuntabilitas, menurut Mardiasmo dalam Rahmawati (2017), merupakan bentuk pertanggungjawaban pemegang amanah kepada publik atas pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya. Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas mencakup transparansi dalam pengelolaan keuangan, pelaporan kegiatan, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Penilaian terhadap kinerja aparatur desa pada indikator ini bertujuan untuk melihat sejauh mana mereka mampu menjalankan tanggung jawab sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (stakeholders), serta mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan pemerintahan desa.

Hasil penelitian di Desa Sendawar menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas telah dilakukan melalui berbagai langkah, seperti penyusunan laporan pertanggungjawaban tahunan, musyawarah desa, dan publikasi anggaran melalui papan informasi. Aparatur desa juga mulai menyadari pentingnya transparansi dan tanggung jawab publik. Namun demikian, pelaksanaannya masih menemui beberapa hambatan, seperti keterbatasan pemahaman teknis dalam pelaporan digital, keterlambatan dalam penyampaian informasi, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kegiatan desa.

Untuk mewujudkan akuntabilitas yang lebih optimal, diperlukan peningkatan kapasitas SDM aparatur, perbaikan sistem informasi, dan keterlibatan masyarakat yang lebih aktif dan menyeluruh. Dukungan terhadap transparansi dan partisipasi publik perlu ditingkatkan agar akuntabilitas dalam pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, indikator akuntabilitas dalam teori kinerja Agus Dwiyanto di Desa Sendawar sudah berjalan cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan agar mencapai standar tata kelola pemerintahan desa yang benar-benar akuntabel dan dipercaya oleh masyarakat.

SIMPULAN

Pada konteks analisis aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma belum sepenuhnya dapat memenuhi pencapaian hasil dari indikator kinerja. Adapun kesimpulan pada indikator tersebut sebagai berikut:

1. Produktivitas Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto, khususnya pada indikator Produktivitas, terkait analisis kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sendawar Kecamatan Kabupaten Seluma, belum berjalan secara optimal.
2. Kualitas Layanan Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto pada indikator Kualitas Layanan terkait analisis kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma belum berjalan secara optimal.
3. Responsivitas Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto pada indikator Responsivitas terkait analisis kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma belum berjalan secara optimal.

4. Responsibilitas Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto pada indikator Responsibilitas terkait analisis kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma sudah berjalan secara optimal.
5. Akuntabilitas Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto pada indikator Akuntabilitas terkait analisis kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma desa sudah berjalan cukup baik, tetapi belum mencapai tingkat optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Christhna, D., Sumampow, I., & Singkoh, F. C. (2017). Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Endah, K. (2018). Penyelenggaraan pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(1), 76–82.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., Mashudi, I., Hasanah, N. U. R., Maharani, A., & Ambarwati, K. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In Rake Sarasini (Issue March). Surabaya: PT. Pustaka Pelajar. <https://Scholar.Google.Com/Citations>.
- Harahap, E. H. (2021). Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Sisoma Kecamatan Tantom Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Lppm*, 12(2b), 23–33.
- Hardiyansyah, H. (2017). *Manajemen pelayanan dan pengembangan organisasi publik*. Gava Media.
- Maemunah, M. (2018). Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1).
- Panjaitan, E., Dewi, R., & Angelia, N. (2019). Peranan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat. *Perspektif*, 8(1), 32–38.
- Rahman, D. (2023). *Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci*. Ilmu Pemerintahan.
- Ressi Dewana, G., Noviansyah, N., Angga Wibowo, G., & Smb, M. S. (2023). *Pengaruh Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Di Pt. Sembaja Lampung*. Universitas Baturaja.
- Rikdan Ardiansyah, M. A. (2024). *Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Sendawar Dalam Penyusunan Peraturan Desa Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma*. Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
- Satria, A., Rosnani, T., Pasca, P., Magister, S., Untan, M., & Magister, P. (2021). Pemberdayaan SDM Aparatur Pemerintahan Desa. *Proceeding Seminar Bisnis*, 5, 1–11.
- Supriadi, E. (2019). Pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(2).
- Tadanugi, I. N. (2020). Peranan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tampemadoro Kecamatan Lage Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 13(1), 1–11.

- Tarigan, E. R. (2023). *Kualitas Pelayanan Pengurusan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo*.
- Uamang, K. (2024). *Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD".